

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, lapangan berusaha, kesempatan kerja, daya saing daerah serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Pembangunan ini juga merupakan perwujudan dari implementasi otonomi daerah yang telah dijalankan. Agar pembangunan dapat terlaksana efektif, efisien, dan tepat sasaran, pemerintahan daerah menyusun perencanaan. Dokumen perencanaan yang disusun terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selaku kementerian terkait menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan.

Dokumen perencanaan daerah disusun sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hendaknya dokumen perencanaan daerah disusun selaras dengan dokumen perencanaan nasional berdasarkan tingkat jenjang pemerintahan. Dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan daerah, gambaran umum kondisi daerah dibutuhkan sebagai bahan acuan perumusan dokumen perencanaan karena merupakan dasar pertimbangan pengambilan kebijakan dan analisis dalam perumusan isu strategis daerah. Terdapat 5 hal yang dimuat dalam gambaran umum kondisi daerah menurut Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 155 Ayat 2 yaitu aspek daya saing daerah, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek potensi daerah,

dan aspek pelayanan umum. Untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap aspek, pemerintah daerah dapat menggunakan indikator berbasis formula dalam lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Penggunaan formula ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam menyusun perencanaan daerah. Salah satu formula yang digunakan tersebut adalah indeks gini.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 mendefinisikan Indeks Gini atau Rasio Gini sebagai alat analisis untuk menghitung tingkat ketimpangan atau kesenjangan pendapatan antar wilayah yang dihitung berdasarkan tingkat pengeluaran penduduk. Nilai indeks gini berkisar antara 0 dan 1. Apabila nilai indeks semakin mendekati 0 mengindikasikan ketimpangan yang semakin merata sedangkan nilai indeks gini yang semakin mendekati 1 artinya ketimpangan antar penduduk semakin tinggi. Berikut adalah data Indeks Gini Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020

**Tabel 1.1**  
**Indeks Gini Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020**

Provinsi	Indeks Gini				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sumatera Selatan	0,348	0,361	0,358	0,331	0,339

*Sumber : data yang diolah, 2021*

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan Indeks Gini di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017, Indeks Gini Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan sebesar 0,013. Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,003 dan kembali turun ditahun 2019 sebesar 0.027. Indeks tersebut kembali meningkat ditahun 2020 sebesar 0,008. Perkembangan indeks gini yang fluktuatif ini juga tercermin pada perkembangan indeks gini 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020.

**Tabel 1.2**  
**Indeks Gini Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan**  
**Tahun 2016-2020**

Kabupaten/Kota	Indeks Gini				
	2016	2017	2018	2019	2020
Banyuasin	0,304	0,316	0,344	0,330	0,323
Empat Lawang	0,310	0,317	0,331	0,320	0,380
Lahat	0,340	0,356	0,306	0,330	0,327
Lubuk Linggau	0,352	0,378	0,324	0,320	0,340
Muara Enim	0,333	0,376	0,354	0,320	0,327
Musi Banyuasin	0,261	0,266	0,326	0,310	0,321
Musi Rawas	0,240	0,280	0,273	0,240	0,262
Musi Rawas Utara	0,258	0,276	0,276	0,270	0,287
Ogan Ilir	0,347	0,345	0,317	0,350	0,316
Ogan Komering Ilir	0,309	0,337	0,330	0,280	0,302
Ogan Komering Ulu	0,347	0,329	0,308	0,320	0,330
Ogan Komering Ulu Selatan	0,319	0,395	0,317	0,320	0,271
Ogan Komering Ulu Timur	0,299	0,285	0,336	0,280	0,289
Pagar Alam	0,360	0,366	0,301	0,330	0,343
Palembang	0,374	0,373	0,383	0,340	0,347
PALI	0,288	0,352	0,298	0,320	0,332
Prabumulih	0,357	0,399	0,414	0,340	0,372

*Sumber : data yang diolah, 2021*

Pada tahun 2017, indeks gini 6 kabupaten/kota mengalami peningkatan dari tahun 2016. Tahun 2017, jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan indeks gini dari tahun 2016 melonjak hingga 13 kabupaten/kota. Pada tahun 2018, jumlah tersebut turun menjadi 4 kabupaten/kota dan kembali meningkat ditahun 2019 yaitu sebanyak 6 kabupaten/kota. Tahun 2020, jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan indeks gini sama seperti ditahun 2016 yaitu 13 kabupaten/kota. Melalui tabel ini dapat diindikasikan bahwa pada tahun 2020 terdapat 13 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang tingkat kesenjangan pendapatannya lebih tinggi dari tahun 2019. Barro dalam Sastra (2017:14) menyatakan bahwa “kesenjangan ekonomi yang lebar berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.” Menurut Sastra (2017:14), terdapat tiga alasan utama keburukan kesenjangan yang tinggi terhadap pertumbuhan

perekonomian. Pertama, menghilangkan kemampuan kelompok masyarakat miskin untuk tetap sehat dan mengakumulasi modal. Kedua, melahirkan kecemburuan antarsesama dan kemarahan kepada masyarakat elit serta yang terakhir berbahaya bagi sistem politik.

Menurut Sukirno (2013:447), “Pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kenaikan produk domestik bruto atau produk nasional bruto riil pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya”. Pertumbuhan ekonomi daerah sangat erat berkaitan dengan pergerakan aktivitas sektor ekonomi di daerah tersebut. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah cenderung meningkat maka dapat diindikasikan aktivitas sektor ekonomi di daerah tersebut sedang meningkat. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2020:3), “Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu”. Dengan adanya Produk Domestik Regional Bruto, pemerintah daerah dapat mengevaluasi capaian perekonomian daerahnya dan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam empat arah pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 poin agenda pemantapan pertumbuhan ekonomi dan penegasan arah pembangunan ekonomi, terlampauinya target Produk Domestik Regional Bruto harus juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Todaro (2011:303) merekomendasikan “adanya pembayaran transfer langsung serta penyediaan barang dan jasa publik sebagai instrumen kebijakan dalam menanggulangi kesenjangan pendapatan”.

Rekomendasi kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui pengeluaran pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeluaran dapat didefinisikan sebagai “uang yang keluar dari kas daerah”. Pengeluaran terdiri dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah melakukan pengeluaran dalam rangka untuk membiayai berbagai program kerja sebagai upaya untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar baik berupa barang dan jasa. Ketersediaan kebutuhan publik tersebut dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi

ketimpangan pendapatan masyarakat. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap perkembangan indeks gini.

Disamping pengeluaran pemerintah, dibutuhkan tambahan modal dari eksternal sebagai upaya mengurangi ketimpangan pendapatan. Tambahan modal tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan penanaman modal atau investasi. Menurut Sukirno (2013:121) “Penanaman modal dalam bentuk investasi akan memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang.” Semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang dan jasa, maka tenaga kerja dapat diserap lebih banyak sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

Angka kemiskinan di Sumatera Selatan tahun 2020 merujuk data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan ikut meningkat menjadi 12,98 persen. Angka tersebut naik dibanding tahun 2019 sebesar 12,56 persen melebihi angka kemiskinan nasional yang sebesar 10,19 persen. Naiknya jumlah penduduk miskin diikuti peningkatan indeks gini. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020, 13 dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan indeks gini. Kepala BPS Suhariyanto dalam pernyataannya kepada situs berita Katadata.co.id mengatakan bahwa semakin mendekati angka 1, indeks gini semakin dikhawatirkan.

Iswanto (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan sementara produk domestik regional bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Laut, dkk (2020) dalam penelitiannya menyatakan penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan sementara tingkat partisipasi angkatan kerja dan produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam hal jumlah variabel dan objek penelitiannya. Peneliti memilih variabel produk domestik regional bruto, pengeluaran pemerintah, dan investasi karena tiga

komponen variabel tersebut sama-sama berkaitan dalam pengukuran ketimpangan pendapatan. Hasil pengukuran ketimpangan pendapatan ini berkaitan terhadap perkembangan indeks gini. Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, dan Investasi Terhadap Perkembangan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Perkembangan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Perkembangan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Investasi berpengaruh terhadap Perkembangan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, dan Investasi berpengaruh secara simultan terhadap Perkembangan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti untuk menjaga agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai produk domestik regional bruto, pengeluaran pemerintah, investasi, dan indeks gini. Lingkup objek penelitian yang digunakan juga terbatas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2016-2020.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Perkembangan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Perkembangan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pengaruh Investasi terhadap Perkembangan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, dan Investasi Terhadap Perkembangan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perencanaan dan penganggaran.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam merencanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.